

Model Dakwah *Networking*: Analisis Dakwah IDIAL-MUI dalam Penutupan Lokalisasi Prostitusi di Jawa Timur

Sunarto AS¹
sunarto@uinsby.ac.id

Abstract: This article seeks to discuss in depth the model of networking proselytising conducted by the Association of Preachers in Localization Area (IDIAL) and the Indonesian Ulama Council (MUI) of East Java in attempting to close down prostitution practices in East Java. Using a participatory approach, this study concluded that the IDIAL-MUI networking da'wah model used both structural and cultural approaches. The structural approach was carried out by building and strengthening power networks, namely bureaucracy, politics and the military in the process of closing the "localization". Whereas the cultural approach is carried out through building networks amongst the social, economic, community, and tertiary organization sectors by using *da'wah bi al-hal*. In addition, the *da'wah bi al-lisan* (verbal) also conducted within the cultural approach through preaching and creating *majlis taklim*.

Abstrak: Artikel ini bertujuan membahas secara mendalam model dakwah berjejaring (*networking*) yang dilakukan Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dalam penutupan lokalisasi prosttusi di Jawa Timur. Dengan menggunakan pendekatan partisipatoris, studi ini menyimpulkan bahwa model dakwah *networking* IDIAL-MUI Jawa Timur menggunakan pendekatan struktural dan kultural. Pendekatan struktural dilakukan dengan cara membangun dan menguatkan jaringan kekuasaan, yakni birokrasi, politik, dan militer dalam proses penutupan lokalisasi. Sedangkan pendekatan kultural dilakukan melalui membangun jaringan dengan sektor organisasi sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dengan menggunakan dakwah *bi al-hal* melalui pendampingan. Selain itu, dakwah *bi al-lisan* juga dilakukan dalam pendekatan kultural ini melalui ceramah dan *majlis taklim*.

Kata Kunci: Dakwah *networking*, model dakwah, pendekatan dakwah, metode dakwah, lokalisasi prostitusi

¹ Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Ditinjau dari aspek *mad'u*, maka *mad'u* patologis seperti pelacur, anak jalanan, dan nara pidana) merupakan prioritas objek dakwah yang harus mendapatkan pesan dakwah oleh para pegiat dakwah. Pada kenyataannya, para pegiat dakwah, khususnya kiai, ustadz, dan *muballigh*, lebih banyak berkulat berdakwah kepada majelis *taklim*, muslimat, *jama'ah* masjid dan mushalla yang *notabene* sudah sering endapat siraman dakwah dibanding *mad'u* patologi. Para pelacur sering luput dari sentuhan dakwah para dai, bahkan tidak jarang mereka dipandang sebelah mata, bahkan dijaui termasuk oleh para *da'i* (Mathieson, 2015)

Masalahnya adalah mengapa para pelacur tidak tersentuh oleh dakwah? Asumsi umum tampaknya mengarah pada jawaban bahwa apapun usaha dakwah yang dilakukan malah semakin menjauhkan pelacur dari keinginan untuk *insyaf*. Padahal salah satu hal yang kurang diperhatikan selama ini adalah menyentuh manusia dengan memanusiakannya. Hal ini luput dari perhatian pendakwah yang cenderung menganggap seorang pelacur hina dan statusnya jauh di bawah manusia lainnya.

Studi ini bertujuan untuk membahas model *da'wah networking* sebagai elemen penting suksesnya penutupan lokalisasi yang ada di Jawa Timur. Melalui *da'wah networking*, pendekatan kepada pelacur di area lokalisasi lebih mudah dilaksanakan dan penutupan lokalisasi yang sudah ada berpuluh tahun dan menjadi hal yang biasa, bahkan bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini terbukti dengan ditutupnya 47 lokalisasi prostitusi yang ada di Jawa Timur oleh IDIAL–MUI Jawa Timur dengan memanfaatkan jaringan dakwah bersama semua kalangan terkait.

Dakwah Networking (Berjejaring): Sebuah Kajian Konseptual

Rainie dan Wellman mengatakan bahwa dunia menjadi jaringan (*networking*). Tidak hanya jaringan komputer, keluarga, dan pertemanan, tapi juga kerja dan organisasi (Wellman, 2014). Jaringan adalah alat mendasar untuk memahami dan memodelkan sistem kompleks dalam fisika, biologi, ilmu saraf, teknik, dan sains sosial

(Benson, 2016, hlm. 163). Verna Allee mendefinisikan jaringan nilai sebagai “jaringan hubungan apa pun yang menghasilkan nilai nyata dan tak berwujud melalui pertukaran dinamis kompleks antara dua atau lebih dari individu, kelompok, atau organisasi” (dalam Grudinschi, dkk, 2014, hlm. 4).

Jaringan adalah struktur saling ketergantungan yang melibatkan banyak organisasi atau bagiannya, di mana satu unit tidak hanya merupakan bawahan formal orang lain dalam beberapa pengaturan hierarki yang lebih besar (O’Toole, 2014, hlm. 361). Marcon dan Moinet menyatakan bahwa jaringan adalah kumpulan individu dan atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung terhubung dan terlibat melalui hubungan sosial, yang harus dilibatkan dan melakukan tindakan yang mencerminkan pertukaran objek sebuah nilai dan makna melalui penundaan (Caldas and Candido, 2013, hlm. 107).

Jaringan dapat dinyatakan sebagai rangkaian keterkaitan yang spesifik di antara seperangkat aktor yang ditetapkan. Namun, jaringan juga sering didefinisikan sebagai hubungan antara aktor yang berbeda. Pelaku dalam jaringan sosial bisa menjadi orang, kelompok, dan kolektif organisasi. Jaringan pribadi didefinisikan sebagai pengelolaan hubungan atau aliansi yang dimiliki individu dengan orang lain di masyarakat mereka. Jaringan organisasi adalah pengaturan sukarela antara dua atau lebih perusahaan yang melibatkan pertukaran yang tahan lama, dan berbagi atau pengembangan bersama produk dan teknologi baru (Sirec and Bradac, 2009, hlm. 60).

Berbagai pendekatan telah memperdalam struktur dan fungsi jaringan. Beberapa telah menganalisis jaringan dalam hal bentuk organisasi, termasuk mode, koneksi dan kekuatan *agregat* dan format organisasi berbasis bersih. Yang lain berfokus pada pengelolaan jaringan, memperdalam isu-isu seperti simpul otonom, kontrol pusat, keseimbangan dinamis dan manajemen variabilitas struktural. Yang lain lagi telah memeriksa strategi jaringan, seperti pembagian sumber daya dan pencapaian tujuan bersama dalam upaya untuk mengevaluasi hubungan jejaring dan hubungan sosial untuk penguatan daya saing (Sirec and Bradac, 2009, hlm. 26). Sementara jaringan sosial dapat mewakili hubungan sosial di antara individu, hubungan kolaborasi

antar organisasi dapat dilambangkan dengan jaringan kolaborasi antar organisasi (Zhao, 2012, hlm. 617).

Jaringan organisasi dapat memiliki berbagai ketegangan dan ikatan yang mencerminkan dan menentukan hubungan antar anggota (W. Lance Bennett, 2019, hlm. 4). Kelebihan koordinasi jaringan baik di sektor publik maupun swasta cukup besar, termasuk peningkatan pembelajaran, penggunaan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan kapasitas untuk merencanakan dan mengatasi masalah yang kompleks, daya saing yang lebih besar, serta layanan yang lebih baik untuk klien dan pelanggan (Provan and Kenis, 2017, hlm. 229). Manajemen jaringan adalah proses pemantauan dan pengendalian jaringan untuk memastikan operasional, pekerjaan dan memberikan nilai bagi administrator jaringan dan penggunaannya (Rao, 2011, hlm. 67).

Dalam konteks komunikasi sosial, jaringan sebagai perilaku yang bertujuan untuk membangun, memelihara, dan menggunakan hubungan informal yang memiliki manfaat (potensial) untuk memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan individu yang secara sukarela memberikan akses terhadap sumber daya dan memaksimalkan keuntungan bersama (Wolff and Moser, 2008, hlm. 4). Kram (dalam. Forret dan Dougherty, 2004) perilaku jaringan akan didefinisikan sebagai upaya individu untuk mengembangkan dan memelihara hubungan dengan orang lain yang memiliki potensi untuk membantu dalam pekerjaan dan perawatannya. Definisi ini menggambarkan jaringan sebagai perilaku proaktif yang membantu mengembangkan konstelasi hubungan seseorang.

Di sisi lain, perusahaan yang bekerja di milenium ketiga adalah organisasi jaringan yang tidak memiliki pilihan kecuali memiliki struktur formal dan informal sehingga pangsa informalnya dominan dalam membandingkan strategi formalnya (Sarlak and Salamzadeh, 2014, hlm. 769). Oleh karena itu, jaringan bisnis dianggap sebagai kerja sama antar-organisasi sukarela antara setidaknya tiga perusahaan, yang otonomi kewiraswastaannya sebagian dibatasi oleh kerja sama (Moeller, 2010, hlm. 30). Dalam perencanaan jaringan distribusi, ada hubungan baik antara jumlah titik distribusi, biaya transportasi dan target layanan pelanggan (Sreenivas dan Srinivas, 2008, hlm. 81).

Dari kajian teoretis di atas, studi ini mendefinisikan dakwah berjejaring (*networking*) adalah jaringan kerja sama yang dibangun oleh Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, guna memperlancar proses penutupan lokalisasi prostitusi di Jawa Timur sebagai implementasi dakwah "*amar ma'ruf nahi munkar*".

Pendekatan Struktural Dakwah *Networking* dalam Penutupan Lokalisasi

Ikatan Da'i Area Lokalisasi (IDIAL) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur melaksanakan dakwah di tengah-tengah lokalisasi prostitusi (Nyathi-Mokoena UCA and Choma, 2013). Organisasi ini menggunakan prinsip dakwah persuasif, integratif, sinergis, humanis dan solutif, serta membangun kerja sama dengan berbagai instansi dan elemen terkait (Mohrman, 2003, hlm. 303). Sebab tidak mungkin memberantas lokalisasi prostitusi hanya dilakukan sendiri atau secara personal (Hashim, 2014, hlm. 222). Kunci terbangunnya dakwah *networking* IDIAL–MUI Jawa Timur ini adalah adanya keseriusan, komitmen, dan keikhlasan para pemangku amanah di lembaga tersebut. Sehingga para penyandang dana dan *stakeholders* memberikan kepercayaan (Hakanen, 2016, hlm. 46) kepada IDIAL–MUI Jawa Timur untuk menjadi garda terdepan mengawal penutupan lokalisasi di Surabaya khususnya, bahkan pada tahun 2017 berkembang di 47 titik lokalisasi di Kabupaten /Kota di Jawa Timur (Katz & Lazer, hlm. 4).

Melalui *Da'wah Networking*, terbangun kerja sama antara IDIAL – MUI JATIM dengan Kementerian Sosial RI, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Kodam V Brawijaya, Pemerintah Kota dan jajarannya, dan kerjasama dengan elemen terkait yang punya visi yang sama, seperti MUI Jatim, GUIB, PT. TERMINAL PETIKEMAS, Yayasan Nurul Hayat, dan bersinergi dengan Yayasan Dana Sosial Alfalah (YDSF) dan BEM ITS, dan BEM UNAIR.

Da'wah Networking akhirnya berhasil membuang persepsi masyarakat yang menganggap lokalisasi yang terletak di Surabaya tidak

bisa dihentikan oleh para pendakwah, bahkan pemerintah. Pada tahun 2014, Surabaya yang memiliki 6 titik lokalisasi prostitusi berhasil membersihkan namanya yang diakhiri dengan penutupan *dolly*, sebagai lokalisasi prostitusi terbesar di Asia Tenggara.

IDIAL–MUI Jawa Timur tidak hanya menerapkan *da'wah networking* di Surabaya saja. Sesuai dengan namanya, IDIAL – MUI Jawa Timur, sejak tahun 2016 telah menutup 47 titik lokalisasi yang ada di Jawa Timur. Sehingga Jawa Timur dinyatakan “ bebas dari lokalisasi prostitusi ”.

Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, dakwah tidak dapat dilakukan secara individu, tetapi harus dilakukan secara kelembagaan dan harus membangun jaringan atau kerjasama dengan berbagai instansi dan elemen terkait.

Menutup lokalisasi prostitusi yang sudah lama berdiri dan memiliki kekokohan, bahkan diakui oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharani yang sangsi pada wacana menutup *dolly*, tentu saja banyak hambatan yang menghadang. Tantangan datang dari oknum TNI/POLRI dan para preman yang menjadi *backing* bisnis seks turun temurun yang dilakukan oleh *Germo/Mucikari*.

Namun, akhirnya IDIAL dan–MUI Jawa Timur dapat meruntuhkan kekokohan lokalisasi Dolly melalui pendekatan dakwah struktural melalui kewenangan keterlibatan kekuasaan wali kota dan pendekatan dakwah kultural melalui IDIAL, yaitu lokalisasi Dolly dapat ditutup tanpa menimbulkan korban jiwa, penutupan berjalan lancar dan kondusif. Hal ini menjadi semangat moral yang besar bagi para dai IDIAL–MUI Jawa Timur untuk lebih giat lagi menutup lokalisasi prostitusi yang ada di Wilayah Jawa Timur dengan target Jawa Timur bebas prostitusi.

Dengan *da'wah networking* ini, maka 6 lokalisasi prostitusi di Kota Surabaya, termasuk Dolly sebagai ikon bisnis seks Kota Surabaya, yang konon terbesar se Asia Tenggara mengalami keruntuhannya. Meskipun prostitusi di kota Surabaya tidak hilang sama sekali²,

² Terdengar desas-desus bahwa prostitusi Dolly bermetamorfosa dalam bentuk lain (E-Dolly), dan prostitusi terselubung dengan sandi “nyala korek api” Sandi korek api,

setidaknya pusat-pusat pelacuran sebagai sumber peredaran narkoba, *human trafficking*, tempat penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan pusat para *begal* menghabiskan uang dari hasil kejahatannya bisa dikurangi atau dihapuskan (Sunarto, 2016) .

Menguatkan Relasi Ulama dan Umara

Sekitar tahun 2009, di sebuah acara buka bersama yang dilaksanakan di Bumi Moro di Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya yang dihadiri oleh hampir semua jajaran FORPIMDA (Forum Pimpinan Daerah) Provinsi Jawa Timur, KH. Abdushomad Bukhori (ketua umum MUI Jawa timur) membisiki Gubernur Soekarwo (Pak de Karwo) "*Jawa Timur memiliki banyak Pondok Pesantren, ada beberapa makam wali, tapi prostitusi dan tempat lokalisasi prostitusi juga banyak, kalau nanti Pak Gubernur sebagai pimpinan di Jawa Timur, di akhirat kelak ditanya oleh Allah bagaimana?*" begitulah kira-kira pertanyaan yang dibisikkan oleh Kiai Shomad. Suara bisikan Ketua Umum MUI Jawa Timur itu rupannya betul-betul menghujam hati Gubernur Jawa Timur, Pak de Karwo.

Sebagai tindak lanjut dari respon Gubernur Jawa Timur terhadap nasihat KH. Abdusshomad Bukhori tersebut, pada tahun 2010 diadakan *Halagah* Alim Ulama di sebuah Hotel di Surabaya yang dihadiri para pimpinan Ormas Islam, para ulama, tokoh masyarakat dan Forum Pimpinan Daerah Jatim. Dalam *halagah* tersebut menelurkan beberapa usulan dan rekomendasi, salah satu rekomendasi itu adalah Jawa Timur harus bebas lokalisasi prostitusi (Long, 2012). Kemudian hasil rekomenadsi itu dikirim kepada Gubernur Jawa Timur.

Pada tahun yang sama, Gubernur Jawa Timur merespon dan menindaklanjuti masukan Ketua Umum MUI Jawa Timur dan hasil *halagah* ulama itu dengan mengeluarkan Suarat Edaran yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota se Jawa Timur, nomor. 460/16474/031/2010 perihal pencegahan dan penanggulangan prostusi, serta *woman trafficking*. Kemudian disusul Surat edaran

para calo menyalakan korek api sebagai sandi untuk memberi sinyal kepada lelaki yang lewat di eks lokalisasi Dolly sebagai tanda tersedianya cewek yang siap *dibooking*

nomor.460/15612/031/2011 perihal penanganan lokalisasi WTS (Wanita Tuna Susila) di Jawa Timur. Yang juga disusul Surat Edaran nomor 460/7705/031/2014 perihal penanganan dan pasca penutupan lokalisasi WTS (Wanita Tuna Susila) di Jawa Timur, ketiga surat edaran Gubernur Jawa Timur diatas jika dicermati merupakan implementasi pendekatan dakwah struktural.

Dengan terbitnya surat edaran Gubernur Jawa Timur, para bupati/wali kota se Jawa Timur yang daerahnya terdapat lokalisasi ada yang merespon dengan cepat, dan segera mempersiapkan penutupan lokalisasi di wilayahnya, seperti Tuban, Tulung Agung, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, dan Malang. Kota Surabaya termasuk yang melangkah lebih awal, meskipun melalui jalan berliku dan panjang, setelah Gabungan Umat Islam Bersatu (GUIB) dan IDIAL – MUI Jawa Timurmendorong dan memberikan semangat secara moral kepada Wali Kota, Tri Rismaharini MT, penutupan lokalisasi prostitusi di Kota Surabaya menggelinding dengan cepat bagai air bah yang tak bisa dibendung.

Membangun Jaringan Pilar Keamanan

Penutupan lokalisasi selalu menghadapi berbagai hambatan, tantangan dan penuh pergolakan antara yang pro dan kontra. Hampir di setiap lokalisasi yang akan ditutup yang selalu diikuti tim IDIAL – MUI JATIM, selalu ada perlawanan dari pihak-pihak atau oknum yang sengaja mengambil keuntungan dari keberadaan lokalisasi. Perlawanan dan penolakan ini antara lain muncul dari para *mucikari* yang merasa memiliki *backing* oknum TNI/POLRI, bahkan para preman. Oleh karena itu, IDIAL – MUI JATIM merasa sangat perlu menjalin kerja sama untuk saling menyatukan sikap dan langkah dalam penutupan lokalisasi di Jawa Timur.

Darisini, maka langkah awal diwali dengan mengadakan pelatihan *da'i* dan bedah buku KIAI PROSTITUSI, karya Sunarto AS, Ketua Umum IDIAL – MUI JATIM di Auditorium UINSA. Sebagai narasumber, Prof. Dr. H. M. Ali Aziz Mag, Guru besar UINSA dan penulis serta *trainer* shalat bahagia, sebagai pembanding, Prof. Dr. Musta'in Masud Msi, Guru besar FISIP UNAIR serta mengundang

Dirbinmas Polda Jatim, yang diwakili AKBP Eriec Kusmayadi S.Sos. SIK. dan Kopol Sumiartono, dan seorang Polwan berpangkat IPTU mewakili Polda Jatim.

Sebagai wujud terjalannya kesatuan tekad dari semua komponen masyarakat baik sipil maupun TNI/POLRI, maka pada tanggal 28 Juni 2014 di gedung mahameru Polda Jatim mengadakan koordinasi penyatuan langkah penutupan lokalisasi di Jatim yang dihadiri jajaran Pemrov Jatim, satuan binmas kabupaten/kota se Jatim, Kasi Propam dan Kanit Binmas kab/kota se Jatim, satker Polda Jatim, Kodam V Brawijaya, Dai Kamtibmas Polda Jatim dan IDIAL – MUI JATIM sebagai garda terdepan penutupan lokalisasi di Jatim. Sebagai narasumber dalam rapat koordinasi tersebut adalah, Ratnadi Ismaun SH. Kabiromo Adm Kesra, Kolonel CPM Candra Sukotjo SH.M.Hum., Danpomdam V Brawijaya, AKBP. Decky Hendarsono Kasubid Paminal Bid. Propam Polda Jatim, dan IDIAL MUI JATIM. Setelah koordinasi ini, maka penutupan lokalisasi di Jawa Timur tak bisa dibendung lagi, bagaikan sebuah benteng runtuh yang diterjang gelombang tsunami yang maha dahsyat.

Tindak lanjut berikutnya, Dirbinmas Polda Jatim mengadakan *silaturahmi* dengan menghadirkan para Binmas se Jawa Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat dengan narasumber dari Propam Polda Jatim dan Denpom Kodam V Brawijaya, IDIAL MUI Jatim, pada *silaturahmi* tersebut. Tujuannya agar jika dijumpai ada oknum TNI / POLRI yang menjadi *backing* Germon atau mucikari segera dilaporkan ke Propam atau Denpom TNI. Hal ini merupakan support moral sangat besar bagi para Da'i IDIAL Jatim dalam menutup lokalisasi di Jawa Timur.

Gejolak di Tengah Proses Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Pada bagian ini tidak semua lokalisasi yang sudah ditutup akan diungkap, akan tetapi hanya disajikan beberapa dipaparkan beberapa lokalisasi dimana penulis terlibat langsung dan hadir di saat deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi tersebut. Selain itu, lokalisasi prostitusi yang proses penutupannya mengalami gejolak (Eva and Maria, 2011, hlm. 30).

1. Lokalisasi Poluwan Srengat dan Pasir Harjo Kabupaten Blitar

Pada saat proses sosialisasi penutupan lokalisasi Poluwan Srengat dan dan Pasir Harjo Talun 2011 Kabupaten Blitar, para WTS dan mucikari menerima tawaran penutupan dengan kompensasi bantuan stimulan dan pemberian keterampilan dari pemerintah, Kemudian pada proses selanjutnya, ada oknum LSM yang memprovokasi kepada para PSK dan mucikari untuk menolak penutupan. Para PSK dan mucikari diiming-imingi dengan janji-janji akan *dibackup*,dsb. Bahkan para PSK diajak *tour* ke Bali dengan disewakan bus oleh oknum LSM tersebut, sambil didoktrin untuk menolak penutupan, sehingga timbul gejolak di dua lokalisasi tersebut.

Papan-papan sosialisasi penutupan yang dipasang dilokalisasi Pasir Harjo dilepas dan dibuang di rel kereta didekat lokalisasi tersebut, bahkan hampir-hampir terjadi *crash* antara unsur masa LSM dan masa GUIB (gabungan umat islam bersatu), yang terdiri dari FPI Banser Ansor Serba guna dan Ormas Islam lainnya. Akhirnya tidak sampai terjadi insiden yang tidak diinginkan, dan pada 8 juni 2011, tepat pukul 9.00 wib lokalisasi Poluwan Srengat dan Pasir Harjo ditambah lokalisasi Ngreco Selorejo resmi ditutup oleh Pemkab Blitar dengan SK Bupati nomor 188/231/409.012/KPTS/2011.Tentang penutupan lokalisasi dan atau tempat praktek prostiusi di Blitar.Serta berdasar Perda No.15 tahun 2008 tentang pelarangan prostitusi dan penanganan WTS.

2. Lokalisasi Dupak Bangunsari Kota Surabaya

Penutupan lokalisasi Dupak Bangunsari sebelumnya diawali pembinaan mental dan pendampingan kepada para wts dan mucikari. Pembinaan ini telah lama dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan menggandeng para tokoh agama setempat, sehingga ketika ada rencana penutupan lokalisasi, dengan konsep “Alih profesi dan Alih Fungsi” hamir-hampir tidak terjadi gejolak dan berjalan lancar. Namun hambatannya adalah, lagi-lagi ada para provokator yang sengaja mencari untung atau diuntungkan dengan adanya lokalisasi prostitusi, mereka memprovokasi para

WTS dan mucikari yang mau mengambil bantuan stimulat untuk modal alih profesi dan alih fungsi, untuk menolak bantuan pemerintah tersebut, bahkan mereka mengancam para WTS dan mucikari yang mengambil bantuan akan “dibunuh”. Sampai-sampai ada beberapa PSK yang harus diungsikan di pondok milik KH.Khoiron Sua’ib untuk tidur dan bermalam disana, karena mereka diancam oleh Germonya.

Puncak perlawanan dari para oknum provokator itu, adanya perlawanan dan perilaku tidak sopan mereka (PSK DAN GM) dihadapan Kapolres Tanjung Perak / KP3 ysng saat itu dijabat AKBP Anomketika dialog di Balai RW 04 Bangunsari. Puncaknya pasca deklarasi penutupan lokalisasi Bangunsari 21 Desember 2012, para provokator yang kebanyakan Germa dan centengnya merobohkan papan “Area bebas lokalisasi prostitusi” yang dipasang Wali Kota Tri Risma Harini. Beberapa hari berikutnya, 9 orang provokator itu ditangkap aparat keamanan dan dijabloskan ke LP Medaeng setelah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bahkan ada seorang mucikari yang meninggal di dalam tahanan. Ketegasan aparat ternyata sangat ampuh untuk meredam kepongahan para provokator yang melanggar aturan mengenai larangan perdagangan manusia. Kemudian Bangunsari berangsur-angsur kondusif. Bahkan sekarang situasinya sangat aman, nyaman dan tenang.

3. Lokalisasi Gude Desa Teguhan Kabupaten Madiun

Ide penutupan lokalisasi Gude kabupaten madiun sudah pernah diusulkan oleh Mukhtarom tahun 1999, yang saat itu ia menjabat ketua komisi E DPRD Kabupaten Madiun, Tahun 1967. “ Kabupaten Madiun sebenarnya sudah mempunyai aturan larangan tempat prostitusi, hanya aturan itu belum berjalan dengan baik”, kata Bupati Madiun Mukhtarom (Jawa Pos Sabtu 18 April 2015 halaman 4). Upaya penutupan lokalisasi selalu terbentur dengan alasan klasik, misalnya Para WTS belum siap karena masih mempunyai tanggungan hutang dan harus membiayai anak-anak mereka, kata Mukhtarom. Setelah adanya surat edaran

Gubernur yang ditujukan kepada Bupati dan Wali Kota se Jawa Timur, bupati madiun Mukhtarom merasa ada dorongan untuk menutup lokalisasi Gude tersebut.

Bertepatan dengan hari pahlawan 10 November 2014, Deklarasi penutupan lokalisasi Gude dibacakan oleh perwakilan masyarakat lokalisasi Gude dihadapan Bupati yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, Ketua Pengadilan Negeri Madiun, Kapolres, Dan lanud Iswahyudi Madiun, toga, tomas bertempat di Balai Desa teguhan kecamatan jiwan Kabupaten Madiun. Saat deklarasi penutupan itu, di lokalisasi Gude dilaksanakan *istigotsah* dan Do'a bersama, yang konon dipimpin oleh seorang kiai yang bertujuan menolak penutupan dan mempertahankan keberadaan lokalisasi Gude. Saat pengambilan bantuan stimulan yang bertempat di Balai Desa Para WTS tidak berani keluar dari lokalisasi karena diancam akan dibunuh oleh oknum sebuah LSM yang *membacking* keberadaan lokalisasi prostitusi tersebut. Namun dengan ketegasan aparat keamanan dari Polda Jatim yang bekerjasama dengan aparat kewanitaan setempat, pengambilan bantuan stimulan berjalan dengan lancar dan tuntas.

4. Lokalisasi Girun dan 6 lokalisasi lainnya di Kabupaten Malang.

Penutupan 7 lokalisasi di Kabupaten Malang, Deklarasi penutupannya dipusatkan di lokalisasi Girun Gondang Legi Wetan 24 November 2011, pukul 09.00 wib. Deklarasi penutupan tujuh lokalisasi langsung dipimpin oleh Bupati Malang, Rendra Kresna dan Kapolres Malang AKBP Aris Haryanto, serta pejabat tinggi Kabupaten Malang lainnya. Deklarasi digelar pada pukul 09.00 WIB. Penutupan secara resmi disampaikan oleh Bupati Malang dan langsung dilanjutkan dengan pemasangan gembok dan stiker bertuliskan "Lokalisasi Ditutup" di semua pintu kamar kompleks lokalisasi yang ada di Girun dan enam kompleks lokalisasi lainnya. Yang patut diapresiasi penutupan 7 lokalisasi di Kabupaten Malang dengan jumlah PSK 308 orang ini, tidak ada perlawanan dan penolakan baik dari PSK dan mucikari.

Penutupan lokalisasi ini didukung oleh semua elemen masyarakat Kabupaten Malang.

5. Lokalisasi Dolly Jarak Kota Surabaya

Proses penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak, juga tidak luput dari pro dan kontra, bahkan timbul perlawanan dari para Germa dan wts yang dirpovokasi para oknum LSM yang sengaja memprovokasi mereka. Menurut sebuah pemberitaan dari sebuah surat kabar nasional yang terbit di Surabaya, Mereka para provokator oknum LSM itu mendapat keuntungan dari upeti perbulan dari para Germa tidak kurang dari 200 juta rupiah.

Demi mempertahankan keradaan lokalisasi Dolly yang konon terbesar se Asia Tenggara, mereka (para provokator) tidak hanya menggunakan cara-cara kekerasan, intimidasi, terror dan lain sebagainya, tetapi mereka juga mengkamufase agama dengan kegiatan religius berupa “*Istighotsah* dan pengajian *Akbar*” dengan menghadirkan seorang Kiai yang dikonon dijuluki “Kiai Gendeng” entah julukan Kiai Gendeng itu sekedar julukan, seperti Kiai Kera Sakti, Kiai Bogang, Kiai Cepot dsb. Atau memang sudah betul-betul “gendeng, sehingga sudah lupa mana yang hak dan mana yang batil, atau mungkin ia mempunyai pandangan yang lain tentang prostitusi. *Wallahu ‘a’lamu bisshowab*.

Dengan kegigihan, keberanian dan tekad bulat dari Srikandi Kota Surabaya Hj. Tri Risma Harini, yang didukung penuh oleh GUIB dan IDIAL Jatim, minus 1 hari penutupan Dolly, GUIB dan didukung IDIAL – MUI Jatim mengerahkan 2000 masanya mendukung penutupan Doly. Akhirnya kebesaran Dolly sebagai lokalisasi terbesar se Asia Tenggara runtuh yang ditandai dideklarasikan penutupan oleh perwakilan warga masyarakat Dolly pada 18 juni 2014 di Gedung Islamic Center Surabaya.

6. Lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo

Proses penutupan lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo relatif lancar dan tanpa hambatan yang berarti. Hal ini karena persiapannya cukup matang dan mereka banyak belajar dari proses

penutupan lokalisasi di daerah-daerah lain. Deklarasi penutupannya dipusatkan di lapangan Kedung Banteng dengan dihadiri jajaran pemprov jatim, bupati ponorogo, dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Ponorogo, IDIAL MUI JATIM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Menteri Sosial RI Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa. Tepat tanggal 9 juni 2015, Deklarasi penutupan lokalisasi prostitusi Kedung Banteng Ponorogo dibacakan ketua mui setempat diikuti tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat di hadapan Mensos RI dan sekitar seribu undangan yang hadir. Dengan demikian runtuhlah lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo, sehingga kesucian ponorogo yang terkenal dengan ponpes Gontornya dan seni Reok Ponorogo semakin terhormat di mata bangsa, bahkan dunia.

7. Lokalisasi Balong Cangkring Mojokerto

Proses penutupan lokalisasi Balong Cangkring mengalami jalan terjal dan berliku karena lokalisasi BC tersebut bernaung dibawah yayasan dana bantuan Mojopahit dan memiliki legalitas mulai akta notaris dan izin kemensos RI. Yayasan dana bantuan Mojopahit ini menangani beberapa PMKS, seperti tuna wisma, tuna karya dan tuna susila, pengamen, pengemis, anak jalanan dan pecandu narkoba. Pada awal berdirinya, yayasan ini dipimpin oleh seorang mantan pejuang Soewono Blong (alm) dan pernah mendapat penghargaan Kalpataru dari Presiden Sorharto. Namun seiring dengan perjalanan waktu dan berganti nakhoda, di dalamnya terjadi aktivitas yang disinyalir menyimpang dari AD/ART yayasan dan melanggar UU *trafficking*, yaitu adanya praktik prostitusi.

Menurut pengakuan pengelolanya, Tegoeh Stariato SH (ketua) dan Doni Rusdianto f. (sekretaris), menurut pernyataan sosiolog UNAIR Prof. Dr. Hotman Siahaan Bahwa yayasan dana bantuan Mojopahit adalah “laboratorium sosial” dan bukan lokalisasi. (sumber hasil rapat koordinasi Biro Adm Kesra, Dinsos jatim dan yayasan dana bantuan Mojopahit 24 Februari 2016). Hal inilah yang membuat proses penutupan lokalisasi BC semakin

tidak jelas, bahkan pihak Pemprov jatim via Biro Adm Kesra yang diwakli Budi Yuwono SH. MM. terlihat sedikit kurang bernyali untuk menutup lokalisasi BC.

Berangkat dari ketidakjelasan proses penutupan lokalisasi BC ini, maka IDIAL MUI Jawa Timur mengambil langkah dengan mengadakan rapat koordinasi pada 24 Februari pukul 13.00 s/d 15.30 dihadiri ketua umum MUI Jawa timur KH. Abdushomad Bukhori, sekretaris umum ust Ainul Yaqin, ketua komisi dakwah KH. Ahmad Fauzi, KH. Drs. Khoiron Syu'aib Kiai prostitusi yang malang melintang di dunia dakwah lokalisasi, Gatot Subianto Humas IDIAL yang selalu bersuara lantang dan tegas tentang penutupan lokalisasi, Dirbintihlul Binmas Polda jatim Kopol Mansur, Biro Adm Kesra Budi Yuwono SH. MM., Dinsos jatim Indera Istianto SH. MM., Dinkes jatim, Dandim Mojokerto Letkol Inf Djohan, Kdinsos Kota Mojokerto, ketua MUI Mojokerto. Rapat dipimpin ketua umum IDIAL – MUI Jatim dan Muhammad Yunus SIP. M.Pdi., selaku notulen.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dandim Mojokerto Letkol Inf Djohan yang penyampaianannya sangat tegas, lugas dan jelas, Kadinsos Mojokerto dan Sekretaris MUI Kota Mojokerto yang memperkuat pernyataan Letkol Djohan, maka penutupan lokalisasi BC Kota Mojokerto adalah harga mati dengan tetap mengedepankan prinsip persuasif, integratif, humanis dan solutif. Pada rapat koordinasi yang dilaksanakan IDIAL – MUI Jatim 24 februari 2016 tersebut penutupan lokalisasi BC Kota Mojokerto akhirnya menemui kejelasan. Puncaknya, pada 29 mei 2016 yang bertepatan dengan HUT Kota Mojokerto ke – 98, lokalisasi Balung Cangkring Kota Mojokerto secara resmi ditutup dengan ditandai Deklarasi Kota Mojokerto bebas prostitusi .

Pendekatan Kultural *Dakwah Networking*: Implementasi Metode Dakwah *Bi al-Hal* Pasca Penutupan Lokalisasi Prostitusi

Di lokalisasi prostitusi Kota Surabaya khususnya, di Bangunsari, mantan pelacur dilibatkan dalam berbagai kegiatan kampung seperti PKK, Pengajian Al - Hidayah, Senam SKJ, dsb. Para *dai* di IDIAL Ja-

wa Timur tidak serta merta membiarkan para pelacur ini kehilangan pekerjaannya dan mencari jalan sesat yang lain. Dengan prinsip “memanusiakan manusia”. Dalam hal ini mantan pelacur, maka mereka lebih mudah diajak ke jalan dakwah. Hal ini terjadi sejak tahun 1990-an dalam bentuk pembinaan rohani yang dialukan sie rohani RW 4 Bangunsari setiapjumat sore bertempat di Balai RW. Pesertanya mencapai 300 pelacur dan sebagian GM (Germo). Respon para pelacur ini berlanjut sampai tahun 2002, ketika FORKEMAS (forum komunikasi elemen masyarakat Surabaya) mengadakan Bina Roani dan asah Ketrampilan di Wisma Remaja tidak kurang 200 pelacur perwakilan dari 6 lokalisasi di Kota Surabaya mengikuti dengan sukarela. Selesai kegiatan, ada beberapa pelacur yang insyaf. Bina Rohani dan Asah Ketrampilan ini berjalan setiap tahun pada bulan ramadhan dan berlanjut sampai tahun 2008. Pada tahun 2004, kegiatan Bina Rohani dan Asa Ketrampilan paling spektakuler diikuti 425 pelacur yang setara dengan hampir satu *kloter* jamaah haji. Pada acara ini disajikan materi keagamaan yang meliputi ketauhidan, fiqh thaharah, dan tata cara shalat, serta ahlak tentang *taubatan nasuchah*, dan materi renungan malam. Narasumbernya didatangkan dari Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Kementerian Agama Kota Surabaya, *majelis taklim Roudlotul Khoir*.

Sedangkan materi keterampilan mendatangkan narasumber dari SMKN 6 Surabaya dan SMKN 8 Surabaya yang mengajarkan tataboga, *handy craft*, membuat tudung saji, dan membuat hantaran pernikahan. Dampak dari kegiatan ini, yaitu ada sekitar 27 pelacur yang *insyaf* dan 5 mucikari yang sadar dan beralih profesi dan alih fungsi. Bahkan ada seorang GM yang mewakafkan rumah bordilnya untuk dijadikan mushalla, yang sekarang berdiri megah dengan nama mushalla *Nurul Iman*. Model dakwah *networking* yang dilakukan oleh IDIAL-MUI Jatim dengan mengimplemetasikan metode dakwah *bi al-hal* dengan cara memberikan keterampilan kepada *mad'u* dan dengan cara “memanusiakan manusia”, maka proses dakwah mendapatkan eksistensinya yang direspon dengan positif oleh *mad'u* patologis.

Simpulan

Keberhasilan Dakwah IDIAL-MUI JawaTimur dalam menutup lokalisasi di JawaTimur tidak lepas dari faktor pendukung, seperti terjalinnya hubungan yang baik dan terjadinya kesatuan visi antara IDIAL dengan instansi terkait, baik swasta maupun pemerintah, terkait dengan penutupan lokalisasi prostitusi.

Selain itu, dengan terjalinnya hubungan dan kerja sama yang baik itu, maka bantuan dana juga diberikan secara proporsional kepada IDIAL untuk bantuan stimulan para pelacur dan mucikari serta masyarakat terdampak penutupan lokalisasi, sehingga ada solusi bagi masyarakat terdampak penutupan “lokalisasi” tersebut.

Disamping faktor pendukung dakwah IDIAL tersebut di atas, sudah tentu juga tidak lepas dari faktor penghambat dakwah IDIAL sebagai berikut, yaitu tantangan dari para preman yang menjadi *backing* bisnis seks para mucikari dan hambatan dari para pebisnis di wilayah lokalisasi yang menggatungkan kehidupan usahanya dari keberadaan lokalisasi prostitusi, seperti para pengusaha parkir, pengusaha laundry, pedagang keliling dan para makelar lokalisasi. Dengan adanya faktor penghambat tersebut tidak menyurutkan semangat dakwah para dai IDIAL-MUI Jatim, justru menjadi pemicu atau daya ungkit semangat para dai IDIAL dalam perjalanan dakwahnya, dan ini merupakan dinamika dalam dakwahnya.

Kemampuan dan kepiawaian para *da'i* yang tergabung di dalam lembaga IDIAL-MUI Jatim dalam menyampaikan pesan dakwahnya kepada *mad'u* patologis (pelacur di lokalisasi prostitusi) juga menjadi kunci keberhasilan model dakwah *networking* ini, khususnya dalam kasus penutupan praktek prostitusi di Surabaya dan di JawaTimur.

Referensi

- Barile, S., & Francesco, P. (2010). Linking the Viable System and Many-to-Many Network Approaches to Service-Dominant Logic and Service Science. *International Journal of Quality and Service Sciences*. 2 (1)
- Bennett, W. Lance et al. (2009). *Narratives and Network Organization: a Comparison of Fair Trade Systems in Two Nations*. Center for Communication and Civic Engagement Working Paper.
- Benson, A.R. et al. (2016). *Higher-Order Organization of Complex Networks*. *Science*. 353 (6295).
- Borgatti, S.P., & Foster, P.C. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research: a Review and Typology. *Journal of Management*, 29 (6).
- Caldas,P.T., & Candido, G.A. (2013). Inter-Organizational Knowledge Conversion and Innovative Capacity in Cooperative Networks. *Journal of Technology Management and Innovation*. 8
- Eva, E., & Maria, E. (2011). Organizational Culture as the Driver of Dense Intra-organizational Networks. *Journal of Competitiveness*. 2
- Forret, M.L. & Dougherty, T.W. (2004). Networking Behaviors and Career Outcomes: Differences for Men and Women? *Journal of Organizational Behavior*. 25
- Grudinschi, D et al. (2015). Creating Value in Networks: a Value Network Mapping Method for Assessing the Current and Potential Value Networks in Cross-Sector Collaboration. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*. 20 (2)
- Hakanen, M at al. (2016). Building Interpersonal Trust in Business Networks: Enablers and Roadblocks. *Journal of Business Models*. 4 (1)

- Katz, N., & Lazer, D. (2010). *Building Effective Intra-Organizational Networks: the Role of Teams*.
- Long, B. (2012). Freedom for Women in the Sex Work Occupation: Twenty-Three Reasons Why Prostitution Should be Legalized in America. *International Journal of Humanities and Social Science*. 2 (16)
- Mathieson, A at al. (2015). Prostitution Policy: Legalization, Decriminalization and the Nordic Model. *Seattle Journal for Social Justice*. 14 (2)
- Moeller, K. (2010). Partner Selection, Partner Behavior, and Business Network Performance: an Empirical Study on German Business Networks. *Journal of Accounting and Organizational Change*. 6 (1)
- Mohrman, S.A. et al. (2003). The Role of Networks in Fundamental Organizational Change: a Grounded Analysis. *The Journal of Applied Behavioral Science*, 39 (3).
- O'Toole, L.J. (2014). Networks and Networking: the Public Administrative Agendas. *Public Administration Review*. 75 (3)
- Provan, K.G., & Kenis, G. (2007). Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*. 18
- Rao, U.M. (2011). Challenges of Implementing Network Management Solution. *International Journal of Distributed and Parallel Systems*. 2 (5)
- Sarlak, M.A., & Salamzadeh, Y. (2014). Analyzing the Impacts of Informal Organizations on Formal Routines in a Networked Organization. *Journal of Asian Scientific Research*. 4.
- Sirec, K., & Bradac, B. (2009). How Does Networking Impact the SMEs Growth. *Organizacija*. 42 (2)
- Sreenivas, M., & Srinivas. T (2008). Effectiveness of Distribution Network. *International Journal of Information Systems and Supply Chain Management*. 1 (1)

- Sunarto, K.P. (2014). Jaudar Press, Surabaya.
- Sunarto. (2015). *Detik-Detik Runtuhnya Dolly*. K-Media. Jogjakarta.
- UCA, Nyathi-Mokoena, & Choma, H.J. (2013). Prostitution Under the Sexual Offences Act in South Africa: a Constitutional Test. *International Journal of Humanities and Social Science*. 3 (1)
- Wellman, B. et al. (2014). Networking Scholars in a Networked Organization. *Research in the Sociology of Organizations*. 40.
- Wok, S., & Shim, J.H. (2014). Communication Networks, Organizational Contacts and Communication Power in Grooming Professionals for Career Success. *Malaysian Journal of Communication*. 30
- Wolff, H.G., & Moser, K. (2008). Effects of Networking on Career Success: a Longitudinal Study, Labor and Socio-Economic. *Research Center University of Erlangen-Nuremberg Discussion Papers*.
- Zhao, K at al. (2012). Simulating Inter-Organizational Collaboration Network: a Multirelational and Event-Based Approach Simulation. *Transactions of the Society for Modeling and Simulation International*. 88(5).